EVALUASI RENJA
TRIBULAN I TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupate Nganjuk Tahun 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024;
3. BAB III Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja;
4. BAB IV Penutup; dan
5. Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi

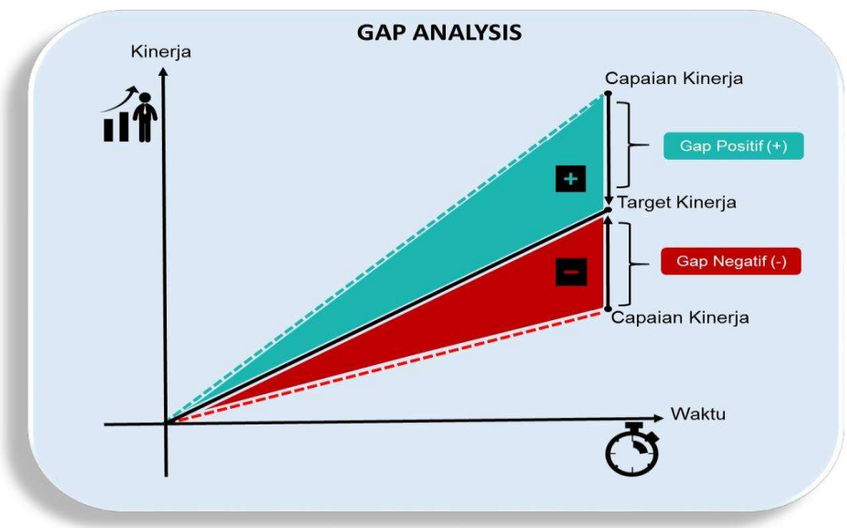
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

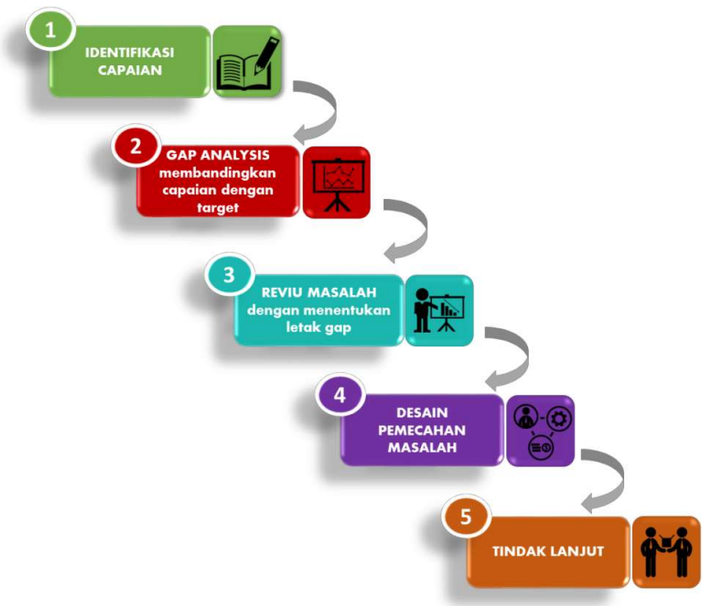
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94	0,00	0,00
2	**Sasaran :** Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94	0,00	0,00
		Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	28,23	0,00	0,00

Pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja tujuan/sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator tujuan meningkatnya akses hunian yang layak terealisasi sebesar 0,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 0,00%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

   Catatan :

   ***) Jumlah Rumah Layak Huni, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal Tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n+(Jumlah rumah layak Huni N-1-RTLH)+Pembangunan rumah baru rumah di kawasan kumuh tahun n+rehab korban bencana tahun n + Pembangunan Korban bencana tahun n.

   ***) Jumlah Rumah, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n + Bangun baru rusus korban bencana tahun n +Pembangunan rumah baru di kawasan kumuh tahun n+data rumah N-1
2. Realisasi indikator sasaran Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 0,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 0,00%.

Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

Catatan :

***) Jumlah Rumah Layak Huni, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal Tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n+(Jumlah rumah layak huni N-1-RTLH)+Pembangunan rumah baru di kawasan kumuh tahun n+rehab korban bencana tahun n + Pembangunan korban bencana tahun n.

***) Jumlah Rumah, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n + Bangun baru rusus korban bencana tahun n +Pembangungan rumah baru rumah di kawasan kumuh tahun n+data rumah N-1

3. Realisasi indikator sasaran Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh terealisasi sebesar 0,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 28,23% dengan tingkat capaian sebesar 0,00%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK dikurangi Luas Tahun n dibagi dengan Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK dikali 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PRKPP	84 (A)	0,00%	0,00%

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Dinas PRKPP” yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 84 (A) pada Tribulan I belum ada realisasi karena evaluasi SAKIP masih sedang berproses. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen dan 3 laporan, antara lain :
   a. Dokumen Perencanaan terdiri dari :

1). Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2). Dokumen Renstra Perangkat Daerah;
3). Dokumen Renja Perangkat Daerah;
4). Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah.

b. Dokumen Penyusunan RKA SKPD
c. Dokumen Penyusunan RKA-Perubahan SKPD
d. Dokumen Penyusunan DPA SKPD
e. Dokumen Penyusunan DPA-Perubahan SKPD
f. Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terdiri dari :
   1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
   2). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
   3). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   4). Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
   5). Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
g. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun yaitu sebanyak 6 Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

   Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi yaitu sebanyak 31 orang yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di penuhi dilaksanakan sebanyak 7 Sub Bagian antara lain Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan Logistik Kantor, penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang

disediakan sebanyak 36 unit. Pengadaan Mebel 30 Unit dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 6 unit.

4. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan keluaran jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun sebanyak 12 laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan keluaran jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebanyak 23 unit. Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit, Kendaraan Dinas Operasional 15 Unit, Peralatan dan mesin 5 unit dan gedung bangunan kantor 2 unit.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase backlog rumah	8%	0,09%	1,12%

Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 8% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0,09%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 1,12%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota berupa 2 Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi PSU Rumah Khusus di Desa Sumberkepuh Kec. Lengkong dan Desa Sendangbumen Kec. Berbek.
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan keluaran Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus berupa 1 laporan Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus.

4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan keluaran Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan berupa 10 dokumen Surat Rekomendasi Siteplan Perumahan yang sudah diterbitkan dan Notulen dan Berita Acara Pembahasan Siteplan Perumahan.
5. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan keluaran JJumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) berupa 1 laporan Berita Acara Konsultasi PBG dan SLF.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan	14,11%	0,03%	0,22%

Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 14,11% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0,03%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0,22%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman berupa 1 laporan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan keluaran Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan berupa 50 unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, 15 unit Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar seluas 22 Ha.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	6,73%	0,02%	0,31%

Dalam Pelaksanaan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 95% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0,02% maka diperoleh persentase capaian sebesar 0,31%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha berupa 291 unit rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha yang diperbaiki.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	5%	0,03%	0,006%

Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase perumahan yang terfasilitasi PSU yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebanyak 5%, dengan realisasi pada Tribulan I sebesar 0,03%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0,006%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan keluaran Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 6 (Enam) lokasi pembangunan PSU Perumahan diantaranya :

a. Pembangunan PSU Drainase di Perumahan GANUNG ASRI;
b. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan NUANSA KAPAS ASRI;
c. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan TAQIYA LAND;
d. Pembangunan PSU Jalan Paving di Perumahan VILLA CANDI MAS;
e. Pembangunan RPTRA di Perumahan Green Werungotok Residence;
f. Pembangunan RPTRA di Perumahan Griya Mastrip Regency.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
7	Program Penatagunaan Tanah	Presentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100%	3,02%	0,030%

Dalam Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja Presentase Permasalahan Pertanahan Yang Difasilitasi yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 100% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 3,02%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0,030%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebanyak 1 (Satu) Laporan. Realisasi Keuangan pada Program Penatagunaan Tanah masih tergolong sangat rendah dengan capaian 0,030%. Penyebab Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤ 80% diantaranya penyerapan anggaran rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka perencanaan maupun konsolidasi tanah disesuaikan dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Terbentuknya Forum dan Pokja PKP, sehingga diharapkan mampu menjembatani penyampaian permasalahan yang timbul pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk kepada para pengambil kebijakan dalam pemenuhan akses hunian yang layak	Permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait
2	**Sasaran :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dibentuk untuk menangani masalah perumahan dan permukiman	Terbatasnya alokasi anggaran dan peranserta masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung program Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni di Kabupaten Nganjuk

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diterapkannya aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN yang membidangi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Penyusunan laporan menunggu hasil validasi BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Penyusunan laporan menunggu hasil validasi BPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Memberikan Motivasi Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya anggaran untuk diklat dan memotivasi kepada Pegawai Negeri Sipil	Kurangnya antusias dari Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik yang harus disediakan	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan logistik kantor tercukupi	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bisa terlaksana	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercukupi	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga fasilitasi kunjungan tamu bisa tercukupi sesuai kebutuhan	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		lalu, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD terlaksana dengan baik	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Mebel	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan lancer sehingga pengadaan mebel terlaksana dengan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan lancer sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya terlaksana dengan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan lancer sehingga penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksana dengan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan kendaraan tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan kendaraan tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan peralatan dan mesin tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan peralatan dan mesin tidak bisa diprediksi sebelumnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi memiliki kompetensi baik	Proses administrasi dengan stakeholder terkait, memerlukan waktu yang lama

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komperehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil kegiatan belum bisa diperoleh
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komperehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan masih berjalan, sehingga hasil kegiatan belum bisa diperoleh
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga	Dalam proses administrasi dengan stakeholder terkait, memerlukan waktu yang panjang
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga	Dalam proses administrasi dengan stakeholder terkait, memerlukan waktu yang panjang
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan PSU pada Rumah Khusus bagi rumah korban bencana	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Adanya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur sewa/retribusi	Masyarakat yang tinggal di Rumah Khusus adalah masyarakat berpenghasilan rendah
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya aplikasi sebagai inovasi percepatan Pelayanan Rekomendasi Siteplan dan Penyerahan PSU Perumahan Formal	Antusias dari pemohon ijin rendah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Proses pengajuan Rekomendasi Siteplan dari Pengembang agak lambat
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Agar masyarakat dapat memproses PBG Hunian dan SLF	Persyaratan dalam memproses PBG Hunian dan SLF yang komplek
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Koordinasi direncanakan pelaksanaannya pada akhir semester I terkait dengan perhitungan kinerja pengurangan luasan Kawasan kumuh sementara
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sehingga pembangunan dapat terarah	Proses pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan masih berjalan sehingga hasil kegiatan belum bisa diperoleh
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah daerah wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulant bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Adanya penerima bantuan yang mengundurkan diri dari program (4), karena berbagai alasan : meninggal, tidak mampu berswadaya, tanah sengketa, tidak ada di tempat dll sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Adanya penerima bantuan yang mengundurkan diri dari program (1), karena alasan meninggal sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Salah satu strategi pengurangan kawasan kumuh adalah dengan menyediakan fasilitas infrastruktur di perumahan dan permukiman kumuh berupa pembangunan jalan/drainase lingkungan sesuai kewenangan daerah	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Banyaknya penerima bantuan yang mengundurkan diri dari program (59), karena berbagai alasan : sakit, meninggal, tidak mampu berswadaya, tanah sengketa, tidak ada di tempat, rumah terbangun dll sehingga anggaran bantuan sosial belum terealisasi secara keseluruhan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pembangunan PSU pada Rumah Khusus bagi Perumahan formal	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan PSU pada Rumah Khusus bagi Perumahan formal	Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa konstruksi belum bisa diproses pemilihannya
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Koordinasi kegiatan fisik pada PSU Perumahan Formal
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Proses serah terima PSU Perumahan Formal dari Pengembang	Belum selesainya persyaratan yang harus dipenuhi dari Pihak pengembang
6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Agar masyarakat yang menempati tanah relokasi Bendungan Semantok dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka TMKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum terbitnya SK Pelepasan/Penunjukkan sehingga kewajiban Bupati sebagai Pemohon Ijin berupa tata batas, reboisasi/rehabilitasi lahan pengganti belum bisa dilaksanakan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Agar masyarakat yang menempati tanah dalam kawasan hutan dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka PPTPKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum jelasnya ketersediaan anggaran melalui DBHCHT terkait verifikasi sisa usulan PPTPKH sekaligus tata batasnya, sehingga anggaran yang tersedia belum bisa dioptimalkan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu antisipasi sejak dini untuk upaya-upaya perbaikan dan penyesuaian melalui evaluasi secara berkala setiap bulannya secara intens dan konsisten serta berkoordinasi antar bagian dan sekretaris Dinas PRKPP dan Pimpinan Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Akhirnya melalui laporan evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tribulan selanjutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

1. Ketertarikan Pegawai terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dapat ditingkatkan dengan cara memberikan penghargaan yang dapat digunakan untuk menunjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjadikan salah satu syarat untuk menduduki suatu jabatan yang ada di instansi.
2. Melakukan koordinasi dengan Pokja UKPBJ.
3. Melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak perangkat desa.
4. Melakukan pendampingan kepada pengembang dalam pembuatan siteplan perumahan yang sesuai dengan ketentuan teknis.
5. Melakukan pendampingan kepada pemohon dalam memenuhi dokumen teknis PBG dan SLF.
6. Mengupayakan penambahan anggaran di Perubahan APBD untuk pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi penanganan kumuh yang harus segera ditangani
7. Pendataan dalam identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan lebih ditingkatkan lagi

8. Menganggarkan kembali di Perubahan APBD untuk lokasi-lokasi penanganan kumuh yang harus segera ditangani
9. Menganggarkan kembali di Perubahan APBD bagi calon penerima bantuan yang lain sesuai kriteria untuk optimalisasi anggaran
10. Penyusunan PERBUP 36 Tahun 2023 tentang Juklak Pelimpahan PSU
11. Mengadakan pendampingan dan sosialisasi kepada pengembang
12. Mempercepat jawaban atas sanggahan warga terdampak dengan selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat
13. Segera melakukan pembayaran pokok PSDH, DPEH, Biaya investasi Perhutani setelah P-APBD TA. 2023 disahkan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
PRKPP
NGANJUK

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nganjuk
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Rumah Layak Huni = 96,94%
2. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh = 28,23%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
1	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas PRKPP**	**86 (A)**	**24.962.399.882**	**79%**	**5.677.509.321**	**84 (A)**	**6.625.455.850**		**552.604.522**								**552.604.522**		**0,083**	**78,61%**	**6.230.113.843**		**24,96%**	**DPRKPP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**24 dokumen**	**169.000.000**	**8 dokumen**	**37.463.000**	**8 dokumen**	**46.490.000**	**0 dokumen**	**-**							**0 dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0 dokumen**	**37.463.000**	**0%**	**22,17%**	**DPRKPP**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	12 dokumen	22.000.000	4 dokumen	4.957.000	4 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	4.957.000	0%	22,53%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.986.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	4.986.000	0%	22,66%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.950.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	4.950.000	0%	22,50%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.983.000	1 dokumen	4.950.000	1 dokumen	-							1 dokumen	0	0	0	0 dokumen	4.983.000	0%	22,65%	DPRKPP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	22.000.000	1 dokumen	4.983.000	1 dokumen	4.950.000	0 dokumen	-							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	4.983.000	0%	22,65%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	37.000.000	2 laporan	12.604.000	2 laporan	16.740.000	0 laporan	-							0 laporan	0	0	0	0 laporan	12.604.000	0%	34,06%	DPRKPP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	22.000.000	0 laporan	-	1 laporan	5.000.000	0 laporan	-							0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0%	0,00%	DPRKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**20.895.070.000**	**6 Dokumen**	**4.295.470.444**	**6 Dokumen**	**5.210.436.000**	**0 Dokumen**	**442.461.924**							**0 Dokumen**	**442.461.924**	**0**	**0,085**	**0 Dokumen**	**4.737.932.368**	**0%**	**22,67%**	**DPRKPP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bulan	20.851.070.000	35 orang	4.285.579.444	50 orang	5.200.536.000	31 orang	442.461.924							31 orang	442.461.924	0,62	0,085	31 orang	4.728.041.368	0%	22,68%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 laporan	22.000.000	3 Laporan	4.926.000	3 Laporan	4.950.000	0 Laporan	-							0 Laporan	0	0,62	0	0 Laporan	4.926.000	0%	22,39%	DPRKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 laporan	22.000.000	3 Laporan	4.965.000	3 Laporan	4.950.000	0 Laporan	-							0Laporan	0	0,62	0	0Laporan	4.965.000	0%	22,57%	DPRKPP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**150 Orang**	**237.000.000**	**35 orang**	**8.500.000**	**50 orang**	**23.300.000**	**31 orang**	**1.225.000**							**31 orang**	**1.225.000**	**0,62**	**0,053**	**31 orang**	**9.725.000**	**21%**	**4,10%**	**DPRKPP**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	200.000.000	0	-	0	-		-							0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DPRKPP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	37.000.000	35 orang	8.500.000	50 orang	23.300.000	31 orang	1.225.000							31 orang	1.225.000	0,62	0,05	66 orang	9.725.000	44,00%	26,28%	DPRKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	21 dokumen	**1.003.000.000**	**3 paket**	**424.317.386**	**7 dokumen**	**374.400.850**	**1 dokumen**	**38.162.422**							**1 Dokumen**	**38.162.422**	**0,14**	**0,10**	**1 Dokumen**	**462.479.808**	**4,76%**	**46,11%**	**DPRKPP**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	22.000.000	6 paket	4.880.000	6 paket	4.917.500	1 paket	687.500							1 paket	687.500	0,17	0,14	7 paket	5.567.500	38,89%	25,31%	DPRKPP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	310.000.000	3 paket	86.179.370	3 paket	147.642.450	1 paket	15.636.600							1 paket	15.636.600	0,33	0,11	4 paket	101.815.970	44,44%	32,84%	DPRKPP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	127.000.000	1 paket	38.947.750	1 paket	41.618.700	1 paket	1.494.250							1 paket	1.494.250	1,00	0,04	2 paket	40.442.000	66,67%	31,84%	DPRKPP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	28.000.000	3 dokumen	4.868.000	4 dokumen	5.300.000	1 dokumen	960.000							1 dokumen	960.000	0,25	0,18	4 dokumen	5.828.000	33,33%	20,81%	DPRKPP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	9 laporan	22.000.000	3 laporan	2.573.315	3 laporan	5.210.700	1 laporan'	433.690							1 laporan	433.690	0,33	0,08	4 laporan	3.007.005	44,44%	13,67%	DPRKPP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	472.000.000	9 laporan	232.048.901	1 laporan	164.711.500	1 laporan'	18.950.382							1 laporan	18.950.382	1,00	0,12	10 laporan	250.999.283	333,33%	53,18%	DPRKPP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 dokumen	22.000.000	3 dokumen	54.820.050	3 dokumen	5.000.000	0 dokumen	0							0 dokumen	0	0,00	0,00	3 dokumen	54.820.050	33,33%	249,18%	DPRKPP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**108 unit**	**674.000.000**	**20 unit**	**217.270.000**	**36 unit**	**235.967.200**	**0 unit**	**-**							**0 unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 Dokumen**	**217.270.000**	**4,76%**	**32,24%**	**DPRKPP**
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	90 unit	157.000.000	4 unit	100.500.000	30 unit	60.367.700	0 unit	-							0 unit	0	0,00	0,00	4 unit	100.500.000	22,22%	64,01%	DPRKPP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	517.000.000	16 Unit	116.770.000	6 unit	175.599.500	0 unit	-							0 unit	0	0,00	0,00	16 unit	116.770.000	88,89%	22,59%	DPRKPP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 laporan**	**262.000.000**	**12 laporan**	**118.168.279**	**12 laporan**	**126.400.000**	**3 laporan**	**21.601.902**							**3 laporan**	**21.601.902**	**0,25**	**0,17**	**15 laporan**	**139.770.181**	**41,67%**	**53,35%**	**DPRKPP**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	262.000.000	12 laporan	118.168.279	12 laporan	126.400.000	3 laporan	21.601.902							3 laporan	21.601.902	0,25	0,17	15 laporan	139.770.181	41,67%	53,35%	DPRKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**1.722.329.882**	**9 unit**	**576.320.212**	**23 unit**	**608.461.800**	**5 unit**	**49.153.274**							**5 unit**	**49.153.274**	**0,22**	**0,08**	**11 unit**	**625.473.486**	**15,94%**	**36,32%**	**DPRKPP**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	345.329.882	1 unit	80.333.708	1 unit	121.236.000	1 unit	14.494.500							1 unit	14.494.500	1,00	0,12	2 unit	94.828.208	66,67%	27,46%	DPRKPP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	652.000.000	9 unit	193.702.504	15 unit	240.375.800	3 unit	29.848.774							3 unit	29.848.774	0,20	0,12	5 unit	223.551.278	33,33%	34,29%	DPRKPP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	118.000.000	4 unit	52.705.000	5 unit	46.850.000	1 unit	4.810.000							1 unit	4.810.000	0,20	0,10	5 unit	57.515.000	33,33%	48,74%	DPRKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	607.000.000	2 unit	249.579.000	2 unit	200.000.000	0 unit	-							0 unit	0	0,00	0,00	2 unit	249.579.000	33,33%	41,12%	DPRKPP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase backlog rumah**	**7%**	**8.940.000.000**	**91,52%**	**2.057.587.585**	**8%**	**1.500.000.000**	**0,09%**	**16.752.261**							**0,09%**	**16.752.261**	**1,12%**	**0,011**	**91,61%**	**2.074.339.846**	**1309%**	**23,20%**	**DPRKPP**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**450.000.000**	**1 dokumen**	**178.897.865**	**2 dokumen**	**250.000.000**	**0 dokumen**	**5.293.000**							**0 dokumen**	**5.293.000**	**0,00**	**0,021**	**1 Dokumen**	**184.190.865**	**20%**	**40,93%**	**DPRKPP**
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	3 dokumen	150.000.000	1 dokumen	111.397.865	1 dokumen	50.000.000	0 dokumen	5.293.000							0 dokumen	5.293.000	0,00	0,106	1 Dokumen	116.690.865	33%	77,79%	DPRKPP
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 dokumen	300.000.000			1 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-							0 dokumen	-	0,00	0,000	0 dokumen	-	0,00%	0,00%	DPRKPP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1 dokumen	100.000.000	0 dokumen	-							0 dokumen	-	0,00	0,000	0 dokumen	-	0%	0,00%	DPRKPP
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi**	**534 unit rumah**	**6.040.000.000**	**95 Unit rumah**	**1.756.491.660**	**150 unit rumah**	**550.000.000**	0 unit rumah	**2.067.000**							0 unit rumah	**2.067.000**	**0**	**0,004**	**95 Unit rumah**	**1.758.558.660**	**17,8%**	**29,12%**	**DPRKPP**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	150 unit	900.000.000	0	-	25 unit	200.000.000	0 unit	-		-		-		-	0 unit	-	0,00	0,000	0 unit	-	0,00%	0,00%	DPRKPP
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana	19 unit	600.000.000	0	-	5 unit rumah	150.000.000	0 unit rumah	-							0 unit rumah	-	0,00	0,000	0 unit rumah	-	0,00%	0,00%	DPRKPP
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	65 unit	652.000.000	20 unit rumah	214.332.300	20 unit	200.000.000	0 unit	2.067.000							0 unit	2.067.000	0,00	0,010	20 unit rumah	216.399.300	0,00%	33,19%	DPRKPP
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	300 unit	3.888.000.000	75 unit rumah	1.542.159.360	0	-		**-**		-		-		-	0	-	0,00	0,000	75 unit rumah	1.542.159.360	0%	0,00%	DPRKPP
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**3 dokumen**	**150.000.000**	**0**	**-**	**1 laporan**	**50.000.000**	**0 Laporan**	**1.000.000**							**0 Laporan**	**1.000.000**	**0,00**	**0,020**	**0 laporan**	**1.000.000**	**0,00%**	**0,67%**	**DPRKPP**
		Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	3 dokumen	150.000.000	0	-	1 dokumen	50.000.000	0 Laporan	1.000.000							0 Laporan	1.000.000	0,00	0,020	0 laporan	1.000.000	0,00%	0,67%	DPRKPP
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**30 dokumen**	**1.700.000.000**	**2 dokumen**	**96.278.795**	**10 dokumen**	**500.000.000**	**0 dokumen**	**1.125.000**							**0 dokumen**	**1.125.000**	**0,00**	**0,002**	**2 dokumen**	**97.403.795**	**6,67%**	**5,73%**	**DPRKPP**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	30 dokumen	300.000.000	6 dokumen	50.600.155	10 dokumen	100.000.000	0 dokumen	1.125.000							0 dokumen	1.125.000	0,00	0,011	6 dokumen	51.725.155	20,00%	17,24%	DPRKPP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 laporan	1.400.000.000	1 laporan	45.678.640	1 laporan	400.000.000	0 laporan	-							0 laporan	-	0,00	0,000	6 dokumen	45.678.640	20,00%	3,26%	DPRKPP
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**3 laporan**	**600.000.000**	**1 laporan**	**28.700.420**	**1 laporan**	**150.000.000**	**0 laporan**	**7.267.261**							**0 laporan**	**7.267.261**	**0,00**	**0,048**	**1 laporan**	**35.967.681**	**33,33%**	**5,99%**	**DPRKPP**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 laporan	600.000.000	1 laporan	28.700.420	1 laporan	150.000.000	0 laporan	7.267.261							0 laporan	7.267.261	0,00	0,048	1 laporan	35.967.681	33,33%	5,99%	DPRKPP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan**	**42,33%**	**16.506.000.000**	**96,36%**	**9.386.905.570**	**14,11%**	**4.126.959.800**	**0,03%**	**8.928.800**							**0,03%**	**8.928.800**	**0,22%**	**0,002**	**96,39%**	**9.395.834.370**	**228%**	**56,92%**	**DPRKPP**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		**-**	**1 dokumen**	**11.879.220**	**1 laporan**	**15.215.700**	**0 laporan**	**1.541.200**							**0 laporan**	**1.541.200**	**0,00**	**0,101**	**1 dokumen**	**13.420.420**	**6,67%**	**0,00%**	**DPRKPP**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	-			1 laporan	15.215.700	0 laporan	1.541.200							0 laporan	1.541.200	0,00	0,101	1 laporan	1.541.200	33,33%	0,00%	DPRKPP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**-**		**-**	**1 dokumen**	**120.000.000**	**0 dokumen**	**3.358.600**							**0 laporan**	**3.358.600**	**0,00**	**0,028**	**1 dokumen**	**3.358.600**	**6,67%**	**0,00%**	**DPRKPP**
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					3 dokumen	120.000.000	0 dokumen	3.358.600							0 Dokumen	3.358.600	0,00	0,028	1 dokumen	3.358.600	0,00%	0,00%	DPRKPP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan**	**30 lokasi**	**16.506.000.000**	**96,42%**	**9.375.026.350**	**30 lokasi**	**3.991.744.100**	**0 lokasi**	**4.029.000**							**0 lokasi**	**4.029.000**	**0,00**	**0,001**	**0 lokasi**	**9.379.055.350**	**0,00%**	**0,00%**	**DPRKPP**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 unit rumah	3.150.000.000	43 unit rumah	752.500.000	50 unit rumah	1.072.500.000	0 unit rumah	2.529.000							0 unit rumah	2.529.000	0,00	0,002	0 unit rumah	755.029.000	0,00%	0,00%	DPRKPP
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	45 unit rumah	1.417.500.000			15 unit	450.000.000	0 unit	-							0 unit	-	0,00	0,000	0 unit	-	0,00%	0,00%	DPRKPP
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	66 Ha	11.938.500.000	40 Ha	8.565.215.900	22 Ha	2.469.244.100	0 Ha	1.500.000							0 Ha	1.500.000	0	0,001	40 Ha	8.566.715.900	0,00%	71,76%	DPRKPP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**12,49%**	**28.350.000.000**	**93,56%**	**5.082.899.207**	**6,73%**	**4.795.040.200**	**0,02%**	**14.773.522**							**0,02%**	**14.773.522**	**0,31%**	**0,003**	**93,58%**	**5.097.672.729**	**749,27%**	**17,98%**	**DPRKPP**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	**Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**1350 unit rumah**	**28.350.000.000**	**268 unit rumah**	**5.082.899.207**	**450 unit rumah**	**4.795.040.200**	**0 unit rumah**	**14.773.522**							**0 unit rumah**	**14.773.522**	**0,00**	**0,003**	**268 unit rumah**	**5.097.672.729**	**19,85%**	**17,98%**	**DPRKPP**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1350 unit rumah	28.350.000.000	268 unit rumah	5.082.899.207	450 unit rumah	4.795.040.200	0 unit rumah	14.773.522							0 unit rumah	14.773.522	0,00	0,003	268 unit rumah	5.097.672.729	19,85%	17,98%	DPRKPP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU**	**15%**	**14.436.000.000**	**95,02%**	**3.403.515.548**	**5%**	**1.671.952.500**	**0,03%**	**9.617.261**							**0,03%**	**9.617.261**	**0,006**	**0,006**	**95,05%**	**3.413.132.809**	**633,64%**	**23,64%**	**DPRKPP**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU**	**20 lokasi**	**14.436.000.000**	**8 Lokasi**	**3.403.515.548**	**20 lokasi**	**1.671.952.500**	**0 lokasi**	**9.617.261**							**0 unit rumah**	**9.617.261**	**0,00**	**0,006**	**8 lokasi**	**3.413.132.809**	**40,00%**	**23,64%**	**DPRKPP**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 dokumen	360.000.000	1 Dokumen	74.720.870	1 dokumen	120.000.000	0 dokumen	-							0 dokumen	-	0,00	0,000	1 dokumen	74.720.870	33,33%	20,76%	DPRKPP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 lokasi	13.176.000.000	13 Lokasi	3.147.740.060	20 lokasi	1.246.952.500	0 lokasi	-							0 lokasi	-	0,00	0,000	13 lokasi	3.147.740.060	65,00%	23,89%	DPRKPP
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 laporan	450.000.000	1 laporan	112.952.589	1 laporan	150.000.000	0 laporan	8.717.261							0 laporan	8.717.261	0,00	0,058	1 laporan	121.669.850	33,33%	27,04%	DPRKPP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	15 laporan	450.000.000	5 laporan	68.102.029	5 laporan	155.000.000	0 laporan	900.000							0 laporan	900.000	0,00	0,006	5 laporan	69.002.029	33,33%	15,33%	DPRKPP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																										
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi**	**300%**	**2.720.000.000**	**71,33%**	**4.049.725.891**	**100%**	**650.000.000**	**3,02%**	**19.649.332**							**3,02%**	**19.649.332**	**0,030**	**0,030**	**74,35%**	**4.069.375.223**	**24,78%**	**149,61%**	**DPRKPP**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**3 dokumen**	**2.720.000.000**	**2 Dokumen**	**4.049.725.891**	**1 dokumen**	**650.000.000**	**0 dokumen**	**19.649.332**							**0 dokumen**	**19.649.332**	**0,00**	**0,030**	**268 unit rumah**	**4.069.375.223**	**19,85%**	**149,61%**	**DPRKPP**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinironisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Katupaten/Kota	3 laporan	2.420.000.000	1 laporan	3.909.865.741	1 laporan	570.000.000	0 laporan	19.649.332							0 laporan	19.649.332	0,00	0,034	1 laporan	3.929.515.073	33,33%	162,38%	DPRKPP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinironisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Katupaten	3 dokumen	300.000.000	1 Dokumen	139.860.150	1 dokumen	80.000.000	0 dokumen	-							0 dokumen	-	0,00	0,000	1 Dokumen	139.860.150	33,33%	46,62%	DPRKPP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,87%**	**2,26%**	**DINAS PRKPP**				
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah		**DINAS PRKPP**				

Catatan : *)

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Disusun
Nganjuk, 05 April 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KAB. NGANJUK DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Dievaluasi
Nganjuk,
Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk

Drs. ADAM MUHARTO,AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730511 199311 1 002